



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DAN LITERASI DIGITAL

Sali Susiana

Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tahun ini, 121 bursa efek di seluruh dunia, termasuk Bursa Efek Indonesia, ikut merayakan 10 tahun *"Ring the Bell for Gender Equality"* untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang diperingati tiap tanggal 8 Maret. Tema tahun ini yaitu *"Invest in Women: Accelerate Progress"* atau *"Berinvestasi pada Perempuan: Mempercepat Kemajuan"*, yang digagas oleh the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). Tema ini menekankan 5 bidang utama yang memerlukan tindakan bersama untuk memastikan perempuan tidak tertinggal, salah satunya mengakhiri kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2022, dari jumlah penduduk miskin sebesar 26,16 juta orang, 9,65% di antaranya adalah perempuan. Sementara persentase laki-laki yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 9,29%. Berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini telah menasar pada perempuan, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya melalui strategi keuangan inklusif, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.

Khusus untuk perempuan, telah diluncurkan SNKI Perempuan pada 9 Juni 2020 yang bertujuan meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan sehingga mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan. Program ini menasar perempuan dalam kelompok pendapatan 40% terendah; perempuan pekerja, terutama pekerja migran; pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta perempuan pengurus rumah tangga. Adapun area prioritasnya antara lain edukasi dan literasi keuangan serta layanan keuangan digital untuk perempuan.

Agar dapat memanfaatkan program ini, tentu perempuan harus memiliki kecakapan digital. Sementara data menunjukkan bahwa literasi digital pada perempuan masih lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Hal ini antara lain dapat dilihat dari jumlah pengguna telepon seluler aktif per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa dan jumlah pengguna internet per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa. Berdasarkan data dari BPS, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler dalam 3 bulan terakhir lebih tinggi laki-laki (71,94%) dibanding perempuan (62,62%). Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (termasuk facebook, whatsapp, youtube, dan instagram) juga lebih tinggi laki-laki (72,07%) dibanding perempuan (66,35%). Riset tentang literasi digital di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2020 juga menemukan bahwa perempuan memiliki indeks literasi digital yang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan digital pada perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan literasi digital. Literasi digital ini penting untuk meningkatkan pengetahuan teknologi digital bagi perempuan.

Terkait literasi digital, Presiden telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021. Program yang melibatkan 110 lembaga dan berbagai komunitas ini membuka kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga memiliki Program Literasi Digital dan Program Digital Talent Scholarship (DTS) sebagai bagian dari Enam Program Strategis Kemenkominfo.

Atensi DPR

Literasi digital memiliki peran yang penting untuk memberdayakan ekonomi perempuan. Pemerintah telah memiliki beberapa program yang terkait dengan literasi digital. Untuk itu, perlu dicermati apakah program-program ini telah berdampak signifikan terhadap literasi digital perempuan.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan: (1) Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membahas upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan literasi digital pada perempuan; (2) Rapat Kerja dengan Kemenkominfo untuk membahas implementasi Program Literasi Digital Nasional dan Program Digital Talent Scholarship (DTS) serta kaitan dua program tersebut dengan literasi digital bagi perempuan; dan (3) Rapat Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membahas literasi digital pada perempuan pelaku UMKM.

Sumber

kompas.id, 11 Februari 2023;
Kontan, 11 s.d 17 Maret 2024;
liputan6.com, 18 November 2023; dan
viva.co.id, 22 April 2021.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.